



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1
Telp. 0541 - 661832, 663880, Fax : 6669032 Email : dinas.pmd.kukar@gmail.com

Tenggarong, 03 Oktober 2025

Nomor : P-570/SET.DPMD/000.7.5/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Usulan Prioritas Perubahan Anggaran Tahun 2025**

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Selaku TAPD
di-

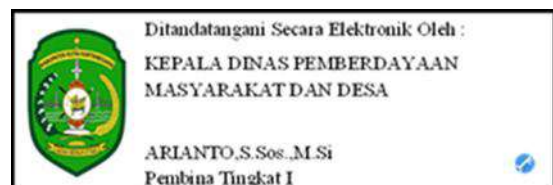
Tenggarong

Berdasarkan surat kami yang kami tujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 22 September 2025 Nomor : P-531/SET.DPMD/900.1.2.4/09/2025 hal : Usulan Perubahan Anggaran Tahun 2025, yang kemudian mendapat disposisi dan diarahkan kepada Kepala BPKAD.

Bahwa usulan kami dimaksud belum dapat diakomodir, namun terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat kegiatan fasilitasi proses Pemekaran Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dilanjutkan prosesnya dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif pada rencana 7 (tujuh) proses pemekaran desa. Adapun proses penetapan desa definitif harus melalui fasilitasi dan pendampingan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Informasi Geospasial (Bogor) dan Kementerian Dalam Negeri (Jakarta). Mengingat ketersediaan dana untuk kegiatan fasilitasi masih kurang maka perlu dilakukan penambahan anggaran agar proses pemekaran dapat tetap berlanjut. Dan yang kedua adalah kekurangan penganggaran untuk honorarium PA, KPA, BP dan BPP. Untuk itu kami perlu melakukan pergeseran/perubahan Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang lebih mengutamakan pencapaian target dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Sehubungan hal tersebut diatas, mengingat urgensi proses pemekaran desa pada 7 desa persiapan menjadi desa definitif ini, kiranya dapat menjadi pertimbangan dan mohon persetujuan Usulan Prioritas Anggaran Perubahan Tahun 2025 (sebagaimana daftar terlampir).

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perkenan diucapkan terima kasih.



Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong (Sebagai Laporan);
2. Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong;
3. Arsip

Daftar Usulan Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Selisih	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	75		75			
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	199.160.000	12	214.160.000	15.000.000	Kekurangan Honorarium PA, KPA, BP dan BPP
2	PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	25,91		25,91			
2.1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Desa	7	178.361.720	7	341.000.000	162.638.280	Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pemekaran 7 Desa dan 1 Kelurahan
4	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	90		90			
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	10		10			
4.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	5	7.242.726.124	5	7.065.087.844	(177.638.280)	Pengurangan Pagu yang dialihkan ke Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
Total					7.620.247.844		7.620.247.844	-	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1
Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 76611

Laman: <https://dpmd.kukarkab.go.id/> Email: dinaspmdkukar@gmail.com

Tenggarong, 22 September 2025

Nomor : P-531/SET.DPMD/
900.1.2.4/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : **Usulan Perubahan Anggaran Tahun 2025**

YTH. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Ketua TAPD

Di-

Tenggarong

Berdasarkan RKPD-Perubahan Tahun 2025 yang telah terinput pada Aplikasi SIPD RI dan menidakanjutu hasil Rapat Pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tanggal 19 September 2025, bahwa perlu dilakukan penyesuaian prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang lebih mengutamakan pencapaian target dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Sehubungan hal tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Sekretaris Daerah agar dapat menyetujui Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2025 (sebagaimana daftar terlampir).

Demikian disampaikan, besar harapan kami agar Bapak dapat mengabulkan usulan yang disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak dalam hal ini sebelumnya diucapkan terima kasih.



Handwritten notes:
- YTH. K. PP
- pelayanan-banjarbaru
- TL dan mai kesenja

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran:

Rekapitulasi Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	75	25.152.689.801	75	25.503.889.129	351.199.328	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	451.582.870	100	450.382.870	(1.200.000)	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	226.964.460	3	226.964.460	-	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	16.464.000	3	16.464.000	-	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	58.601.010	1	58.601.010	-	
1.1.4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	1	52.224.400	1	52.224.400	-	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
	Statistik Sektor Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah							
1.1.5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	82.863.000	1	81.663.000	(1.200.000)	Efisiensi Anggaran
1.1.6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	14.466.000	1	14.466.000	-	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Laporan	12	14.970.423.977	12	14.983.455.577	13.031.600	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2142	14.743.895.837	2191	14.743.895.837	-	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	13.688.440	1	13.688.440	-	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	199.160.000	12	214.160.000	15.000.000	Kekurangan Honorarium KPA dan BPP
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	13.679.700	1	11.711.300	(1.968.400)	Efisiensi Anggaran
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	84.143.600	1	55.643.600	(28.500.000)	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	11.598.800	1	11.598.800	-	
1.3.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	48.060.000	1	31.560.000	(16.500.000)	Efisiensi Anggaran
1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	Laporan	1	24.484.800	1	12.484.800	(12.000.000)	Efisiensi Anggaran

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
	Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	40	47.517.400	40	44.582.550	(2.934.850)	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	16.273.400	1	15.602.800	(670.600)	Efisiensi Anggaran
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	31.244.000	30	28.979.750	(2.264.250)	Efisiensi Anggaran
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	76,27	8.133.738.550	76,27	8.504.211.321	370.472.771	
1.5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	483.538.600	1	558.350.529	74.811.929	Kekurangan Anggaran Rapat karena di Sub Kegiatan yang di Bidang dilakukan Efisiensi Anggaran Makan Minum Rapat
1.5.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	11.227.350	1	11.227.350	-	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
		yang Disediakan							
1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.063.159.000	4	2.063.159.000	-	
1.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	137.431.000	12	437.431.000	300.000.000	Kekurangan Anggaran Perjalanan Dinas
1.5.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	200	42.079.600	200	37.740.442	(4.339.158)	Efisiensi Anggaran
1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	5.396.303.000	4	5.396.303.000	-	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	233.610.250	100	233.106.100	(504.150)	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	204.570.000	5	204.570.000	-	
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	Unit	5	29.040.250	5	28.536.100	(504.150)	Efisiensi Anggaran

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
		Mesin Lainnya yang Disediakan							
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	945.107.354	100	873.627.111	(71.480.243)	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	229.182.496	1	229.182.496	-	
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	267.876.000	1	254.008.350	(13.867.650)	Efisiensi Anggaran
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	448.048.858	12	390.436.265	(57.612.593)	Efisiensi Anggaran
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	23	286.565.800	23	358.880.000	72.314.200	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	6	40.000.000	6	77.360.000	37.360.000	Untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opsional

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	196.570.000	20	233.200.000	36.630.000	Untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	65	49.995.800	65	48.320.000	(1.675.800)	Efisiensi Anggaran
1.8.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	-	
2	PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	25,91	67.779.325.068	25,91	67.933.995.823	154.670.755	
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	Desa	27	67.779.325.068	27	67.933.995.823	154.670.755	
2.1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Desa	7	178.361.720	7	341.000.000	162.638.280	Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pemekaran 7 Desa dan 1 Kelurahan
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi	Desa	6	147.351.380	6	162.351.380	15.000.000	Kekuarangan Anggaran yang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
		Penataan Wilayahnya							sudah Realisasi, namun dilakukan Efisiensi Anggaran
2.1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	20	31.693.000	20	31.488.000	(205.000)	Efisiensi Anggaran
2.1.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	0	0	0	0	-	
2.1.5	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	22496	67.421.918.968	22496	67.399.156.443	(22.762.525)	Efisiensi Anggaran
3	PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100	247.808.800	100	236.568.600	(11.240.200)	
3.1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	Desa	52	247.808.800	52	236.568.600	(11.240.200)	
3.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	84.785.000	1	73.544.800	(11.240.200)	Efisiensi Anggaran
3.1.2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	163.023.800	1	163.023.800	-	
4	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	Persen	90	19.521.740.892	90	19.327.933.293	(193.807.599)	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
		Dalam Kategori Baik							
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	10		10			
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Desa	193	19.521.740.892	193	19.327.933.293	(193.807.599)	
4.1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	8	48.952.640	8	48.294.250	(658.390)	Efisiensi Anggaran
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	128.925.010	1	128.925.010	-	
4.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	5	7.242.726.124	5	6.747.796.724	(494.929.400)	Efisiensi Anggaran
4.1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Aparatur	22	66.008.000	22	169.291.709	103.283.709	Sosialisasi Program Prioritas RT Ku Terbaik di 193 Desa
4.1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2	52.808.000	2	202.808.000	150.000.000	Sosialisasi Program Prioritas Kredit Kukar Idaman Terbaik di 193 BUMDesa dan sekaligus

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
									Pendataan Pendapatan dan Unit Usaha BUMDesa (Pengawalan Program Kredit Kukar)
4.1.6	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	14	40.467.000	14	65.415.000	24.948.000	Pemilihan Kepala Desa yang Pergantian Antar Waktu (PAW)
4.1.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	0	1	0	-	
4.1.8	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	3	11.378.103.728	3	11.144.838.100	(233.265.628)	Efisiensi Anggaran
4.1.9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	74.675.500	1	72.500.000	(2.175.500)	Efisiensi Anggaran
4.1.10	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	22	85.507.100	22	400.622.100	315.115.000	Rakerda dan sekaligus Sosialisasi Program RT Ku Terbaik dengan seluruh Anggota BPD
4.1.11	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas	Desa	19	91.593.000	19	140.195.000	48.602.000	Fasilitasi Proses Penataan batas desa yang mengusulkan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
		Desa							pemekaran desa
4.1.1 2	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	7	144.647.390	7	142.583.000	(2.064.390)	Efisiensi Anggaran
4.1.1 3	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	1	0	1	0	-	
4.1.1 4	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	3	167.327.400	3	64.664.400	(102.663.000)	Efisiensi Anggaran
5	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Posyandu Aktif	Persen	70	4.604.672.998	70	4.303.850.714	(300.822.284)	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100		100			
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	Lembaga	4721	4.604.672.998	4721	4.303.850.714	(300.822.284)	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
	Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
5.1.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	6	79.503.000	6	51.582.000	(27.921.000)	Efisiensi Anggaran
5.1.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3	499.300.000	3	454.458.080	(44.841.920)	Efisiensi Anggaran
5.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Lembaga	3194	1.369.741.320	3194	1.335.690.200	(34.051.120)	Efisiensi Anggaran

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
5.1.4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	14	812.505.694	14	805.222.400	(7.283.294)	Efisiensi Anggaran
5.1.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	43.477.200	1	43.357.200	(120.000)	Efisiensi Anggaran
5.1.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat	Laporan	1	315.075.300	1	152.081.250	(162.994.050)	Efisiensi Anggaran

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	P-RENJA SEMULA		P-RENJA MENJADI		Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
				K	Rp	K	Rp	Rp	
		Guna							
5.1.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	4	207.869.850	4	184.258.950	(23.610.900)	Efisiensi Anggaran
5.1.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	0	0	0	0	-	
5.1.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	5	1.277.200.634	5	1.277.200.634	-	
Total					117.306.237.559		117.306.237.559	0	

BERITA ACARA

NOMOR : P-649/DPRD/KETUA/100.3.2./07/2025

RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN 7 DESA OLEH PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERSAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-07-2025). Bertempat di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan rapat yang di hadiri oleh, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua Pansus Dan Anggota-Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Para Kepala Desa dan Perangkat Daerah Terkait (daftar hadir terlampir).

Dengan acara rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat
2. Penyampaian Ketentuan-Ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang 7 Pembentukan Desa Baru.
3. Penyampaian Persyaratan Dokumen Administrasi Dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
4. Penutup.

Rapat dimulai Pukul 12.30 Wita

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Bapak Ir.H.Ahmad Yani, ST.,SE.,M.Si.,I.PM. sebagai Pimpinan Rapat, menyampaikan beberapa hal substansi ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pembentukan 7 Desa Pada Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil Rapat Disepakati:

1. Menyepakati Batas Desa Kembang Janggut Dan Desa Tanjung Berukung Dengan Penyesuaian Dan Kesepakatan Antar Wilayah Desa.
2. Menyepakati Perubahan Nama Desa Tanjung Barukang Menjadi Desa Tanjung Barukung.
3. Menyepakati memasukkan RT 15 Kedalam Desa Persiapan Tanjung Berukang.
4. Menyepakati Nama Desa Jembayan Ilir dan Sungai Payang Ilir.
5. Menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pembentukan Desa Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Sungai Payang Ilir Kecamatan Loa Kulu, Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana, Desa Loa Duri Sebarang Kacamatan Loa Janan, Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak, Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu, dan Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut.

Rapat Ditutup

Rapat di tutup pada Pukul 13.30 Wita oleh Pimpinan Rapat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 22 Juli 2025

PIMPINAN RAPAT,

IR. H. AHMAD YANI, ST., SE., M. SI., I. PM.

SEKRETARIS DEWAN,

H.M. RIDHA DARNAWAN, SP., MP.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan Telepon (021) 7942373-74
Fax. 7942374 Website: binapemdes.kemendagri.go.id

Kelengkapan Dokumen Pembentukan Desa (Pemekaran Desa):

Tanggal checklist	:	
Nomor Surat	:	
Provinsi	:	
Kabupaten	:	
Kecamatan	:	
Desa Induk	:	
Desa Persiapan	:	

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
Desa				
1	Berita acara kesepakatan Musyawarah Desa			
	a. Berita acara			
	b. Notulen			
	c. Daftar hadir			
	d. Undangan			
Desa Persiapan				
2	Laporan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan per semester			
Kabupaten/Kota				
3	Surat Keputusan Tim Pembentukan Desa Persiapan Kab/Kota			
4	Verifikasi dan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kab/Kota			
	a. Evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa			
	b. Verifikasi Jumlah penduduk Desa induk*			
	c. Verifikasi Jumlah penduduk Desa Persiapan**			
	d. Perbup Peta Batas Desa Induk***			
	e. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Form 7			
	f. Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis BIG			
	g. Peta Batas Desa Persiapan***			
	h. Rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan.			
5	Peraturan Bupati/Wali Kota Desa Persiapan			
6	Kode Register Desa Persiapan Dari Gubernur			
7	SK Bupati/Wali kota Tentang Pengangkatan Pj. Kades persiapan			

8	Dokumen Hasil Kajian dan Verifikasi Tim yang menyatakan Desa persiapan layak menjadi desa berdasarkan laporan Pj. Kades persiapan			
9	Ranperda Pembentukan Desa paling sedikit memuat:			
	a. Nama Desa/Kelurahan lama dan baru;			
	b. Nomor kode desa/kelurahan yang lama;			
	c. Jumlah penduduk;			
	d. Luas wilayah;			
	e. Cakupan wilayah kerja Desa baru			
	f. Peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.			
10	Surat Penyampaian Ranperda tentang Pembentukan Desa dari Bupati/Wali kota kepada Gubernur			

- * Hasil Verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang telah disinkronisasi dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri
- ** Hasil Verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
- *** Data/dokumen terkait penetapan dan penegasan batas Desa yang telah mendapatkan Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Supervisi Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG)

Provinsi				
11	Surat Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Tim Penataan Desa Tingkat Provinsi			
12	Keputusan Gubernur terkait Hasil Evaluasi Ranperda			
13	Nomor Register Ranperda Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi			
14	Gubernur Menyampaikan Ranperda yang telah diberikan nomor Register Ranperda kepada Menteri, dilengkapi dengan dokumen:			
	a. Hasil Evaluasi Ranperda oleh Gubernur			
	b. Ranperda Kab/Kota yang telah mendapatkan Nomor Register			
	c. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;			
	d. Berita acara musyawarah Desa;			
	e. Perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;			
	f. Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan			
	g. Dukungan anggaran Desa persiapan			
	h. Hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.			
15	Surat Permohonan Penerbitan Kode Desa dilampiri Nomor Registrasi usulan Penataan Desa dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri			
16	Berita Acara Hasil Evaluasi Kelengkapan Persyaratan Usulan Penataan Desa oleh Tim Penataan Desa Tingkat Provinsi			
17	Surat Pernyataan dari Pejabat Pemerintah Provinsi yang bahwa dokumen usulan telah dilakukan evaluasi dan bersedia bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen usulan penataan Desa			

- Keterangan tambahan:
1. Dokumen yang disampaikan asli atau sudah dilegalisir.
2. Dokumen akan dikembalikan/tidak dapat diproses apabila dokumen tidak sesuai check list tersebut.